

## Pengaruh Pendapatan Negara dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional Paska Covid-19

Indah Ameylia Putri<sup>1</sup> ✉, Dyah Mutiarin<sup>2</sup>, Muhammad Noor Cahyadi Eko Saputro<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Department of Government Affairs and Administration, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

<sup>2</sup>Department of Government Affairs and Administration, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

<sup>3</sup>Department of Government Affairs and Administration, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

✉ [ameyliaindah07@gamial.com](mailto:ameyliaindah07@gamial.com)

### **Abstract**

*A country's economic growth inevitably evolves from one era to the next. But in general, the global geopolitical conditions that exist in the 21st century era have affected the structure of government revenues and expenditures. This study will discuss the effect of state revenues and government expenditures that affect the rate of national economic growth after the co-19 pandemic. This study uses a systematic literature review analysis method obtained through various academic and non-academic articles such as journal articles, policy briefs, national development planning documents, working papers of relevant ministries, and mainstream online mass media on national economic conditions. The results in this study prove that national economic development after the co-19 pandemic is the result of restructuring the government's ability to manage state finances which include revenue generation and spending. In addition, the state's ability to manage large production capacity can be a sign of the high level of prosperity of citizens in a nation. So this research has broad consensus implications characterized by incessant investment in human capital and physical infrastructure that can later accelerate the rate of economic growth.*

**Keywords:** Economic Growth 1; State Income 2; Government Expenditure 3.

## Pengaruh Pendapatan Negara dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional Paska Covid-19

### **Abstrak**

Pertumbuhan ekonomi suatu negara pasti mengalami perkembangan dari satu era ke era berikutnya. Namun pada umumnya, kondisi geopolitik global yang ada di era abad 21 membuat struktur pendapatan dan pengeluaran pemerintah sedikit banyaknya menjadi terpengaruh. Penelitian ini akan membahas mengenai pengaruh pendapatan negara

beserta pengeluaran pemerintah yang berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional paska pandemi covid-19. Kajian ini menggunakan metode analisis *systematic literature review* yang diperoleh melalui berbagai artikel akademis dan non akademis seperti artikel jurnal, policy brief, dokumen perencanaan pembangunan nasional, *working paper* Kementerian terkait, dan media massa online *mainstream* tentang kondisi perekonomian nasional. Hasil dalam penelitian ini membuktikan bahwa pembangunan ekonomi nasional paska pandemi covid-19 merupakan hasil dari restrukturisasi kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangan negara yang meliputi perolehan pendapatan dan belanjanya. Selain itu kemampuan negara dalam mengelola kapasitas produksi yang besar dapat menjadi tanda tingginya tingkat kemakmuran warga negara dalam sebuah bangsa. Sehingga penelitian ini memiliki implikasi konsensus yang luas dengan dicirikan oleh gencarnya investasi dalam modal manusia dan infrastruktur fisik yang nantinya dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.

**Kata kunci:** Pertumbuhan Ekonomi 1; Pendapatan Negara 2; Pengeluaran Pemerintah 3

## 1. Pendahuluan

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk dapat melakukan percepatan terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia sebagai negara berkembang. Beragam kebijakan diterapkan untuk dapat mencapai tujuan pembangunan ekonomi. Salah satu kebijakan yang diterapkan merupakan kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah dalam pengelolaan pengeluaran dan penerimaan negara sebagai upaya dalam tercapainya tujuan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi Indonesia. Keseluruhan ragam variabel permintaan, aktivitas perekonomian, pola distribusi sumber daya, maupun pemerataan pemasukan menjadi variabel yang dapat terjadi perubahan terhadap tingkat serta komposisinya yang dipengaruhi oleh anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah baik berupa pajak maupun pengeluaran pemerintah (Arifah et al., 2020). Sebagai suatu proses dalam meningkatkan kemampuan produksi yang dilakukan oleh suatu negara secara berkelanjutan dan berkesinambungan, pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat memberikan hasil terhadap tingkatan pendapatan secara nasional yang meningkat seiring berjalannya waktu.

Terdapat tiga bagian dalam pertumbuhan ekonomi yang dianggap krusial oleh suatu negara, antara lain: (1) akumulasi modal, yaitu penghitungan terhadap keseluruhan penanaman modal baru baik dalam bentuk abstrak maupun berbentuk fisik hingga pembangunan sumber daya manusia melalui beragam aspek dan bidang kehidupan, (2) perkembangan teknologi secara merata dalam inovasi penyelesaian pekerjaan, dan (3) perkembangan jumlah penduduk sehingga terjadi peningkatan terhadap angka angkatan kerja (Amalia et al., 2022). Kebijakan fiskal yang meliputi penghitungan jumlah Pemasukan dan belanja pemerintah setiap tahun tercantum dalam APBN dan APBD untuk perhitungan dalam skala negara maupun wilayah daerah, bertujuan untuk mengendalikan arah perekonomian. Kebijakan anggaran dalam kebijakan fiskal meliputi anggaran berimbang, surplus, serta defisit. Secara umum, anggaran berimbang ialah anggaran yang pendapatan dan pengeluarannya seimbang. Anggaran surplus ialah anggaran yang pengeluarannya lebih rendah daripada pendapatan.

Hal sebaliknya pada anggaran defisit memiliki lebih banyak pengeluaran daripada pendapatan. Strategi fiskal ini bertujuan untuk mendorong atau mendukung pertumbuhan ekonomi dengan cara menstabilkan harga-harga, tingkat produksi, dan prospek lapangan

kerja. Otonomi daerah yang telah terlaksana sejak runtuhnya era orde baru pada pada tiap daerah baik provinsi ataupun kabupaten kota dilandasi dalam dua elemen strategis, yaitu adanya pelimpahan oleh pemerintah pusat berupa kewenangan yang diambil alih oleh pemerintah daerah sebagai dasar dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Selain itu, daerah dalam hal ini juga berperan sebagai aktor pembangunan melalui sumber daya ekonomi yang dikelola secara baik dan meliputi identifikasi terhadap beragam sumber pemasukan serta pengaturan perbelanjaan yang disesuaikan berdasarkan keperluan dan keutamaan di setiap daerah.

Runtuhnya era orde baru membawa perubahan pada sistem pemerintahan Indonesia yang kini menerapkan kebijakan otonomi daerah dengan kewenangan dalam membuat regulasi untuk memperkuat kemampuan lokal yang memberikan peluang bagi daerah untuk memperluas dan memperkuat perekonomiannya. Kesejahteraan masyarakat daerah akan meningkat secara signifikan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah lokal terus berusaha dalam peningkatan taraf ekonomi yang disesuaikan bersandar pada realita dan keperluan serta kapasitas berdasarkan wewenang yang dimilikinya untuk mengendalikan dan mengelola kepentingan masyarakat. Para pelaku ekonomi daerah harus mendapatkan pelayanan sebaik mungkin dari pemerintah daerah melalui otonomi daerah pada skala lokal sampai skala internasional. Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), belanja pemerintah daerah (Kabupaten/Kota serta Provinsi) kemudian dibagi pada dua kategori besar yakni: pengeluaran rutin, yang kemudian dikenal sebagai belanja aparatur daerah, dan pengeluaran pembangunan, yang dikenal dengan belanja pelayanan publik (Rabbani, 2020).

Pengeluaran rutin sebagai belanja aparatur daerah, mendominasi kedua bentuk pengeluaran ini dalam hal pembangunan di sebagian besar wilayah Indonesia. Pengeluaran rutin, juga dikenal sebagai pengeluaran aparatur daerah, mencakup hal-hal seperti gaji, perlengkapan, *maintenance*, subsidi, pinjaman dan bunga, serta perjalanan bisnis atau dinas. Ini semua adalah contoh pengeluaran konsumen. Berdasarkan sektor pembangunan yang lebih terfokus pada pembangunan permodalan, maka pengeluaran pelayanan publik atau pembangunan dipisahkan. Pemerintah seharusnya memberikan perhatian yang besar terhadap kondisi tersebut karena hal ini terkait dengan peningkatan alokasi pengeluaran pembangunan yang dapat memberikan stimulus terhadap pertumbuhan ekonomi (Sari et al., 2021). Dari sisi penerimaan negara selama ini salah satunya diterima melalui pajak ekspor berbagai barang manufaktur yang memiliki implikasi yang signifikan bagi APBN. Namun selama masa pandemi covid-19 terdapat beberapa macam kebijakan seperti social distancing ataupun lock down yang pada akhirnya mampu menyelamatkan kehidupan namun disisi lain menimbulkan resesi ekonomi karena diikuti dengan efek domino didalamnya yakni pemutusan hubungan kerja (Eichenbaum et al., 2020).

## Literatur Review

### Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Bersumber UU No. 17 Tahun 2003 “APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan”. Halim & Kusufi

(2014, hal 15) memaparkan bahwasanya APBN dikendalikan langsung oleh negara sebagai bagian dari administrasi administrasi umum. APBN dapat digunakan atau dijadikan alat utama dalam mengelola aset negara. Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dan diterapkan juga dapat ditinjau kembali oleh masyarakat untuk melihat sudah sesuai atau belum dengan UU yang tengah berlaku. Pada dasarnya, APBN memiliki tujuan diantaranya seperti:

- a. Sebagai alat untuk meningkatkan modal investasi, yang berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan pengeluaran dan pendapatan negara serta menyediakan dana untuk pelaksanaan pembangunan yang terkait dengan inisiatif pemerintah;
- b. Menggapai pertumbuhan perekonomian untuk menumbuhkan pendapatan negara;
- c. Menggapai kestabilan ekonomi dan memilih arah pembangunan dengan keseluruhan serta prioritas utama.

Dalam pengaturan yang lebih rinci, anggaran suatu negara dapat dengan mudah diumpamakan anggaran rumah tangga maupun usaha, dengan 2 (dua) sisi: pendapatan/penerimaan serta biaya/pengeluaran. Porsi pendapatan dari anggaran rumah tangga begitu tergantung pada perkembangan gaji maupun upah, misalnya. Penyusunan anggaran selalu penuh dengan ketidakpastian di kedua sisi. Demikian pula, perubahan harga jasa serta barang yang rumah tangga konsumsi memiliki dampak yang signifikan pada sisi pengeluaran anggaran mereka. Akibatnya, APBN pada sebuah pemerintahan berfungsi sebagai kerangka untuk melestarikan kehidupan Negara dalam hal kemakmuran, kesejahteraan, dan bahkan pembangunan yang berkelanjutan dari suatu Negara untuk mencapai kemajuan (Wanindi, 2015). Pendapatan Negara dapat dipahami menjadi satu diantara ukuran yang bisa dipakai guna mengevaluasi tingkat potensi dan kemajuan ekonomi suatu negara. Penghitungan terhadap pendapatan nasional didasari dengan tujuan agar memperoleh adanya gambaran mengenai tingkat ekonomi yang telah dicetak oleh suatu negara berdasarkan tingkatan produksi yang dilakukan, kontribusi yang berasal dari beragam sektor perekonomian, struktur pengeluaran secara keseluruhan, dan tingkatan kesejahteraan yang telah diperoleh oleh suatu negara.

Pada sisi lain, prakiraan mengenai perekonomian bangsa di masa depan dapat dibuat dengan menggunakan hasil pengukuran yang telah diperoleh sebelumnya. Perusahaan dapat menggunakan prakiraan ini untuk merencanakan operasi ekonomi masa depan mereka dan untuk menciptakan strategi ekonomi yang akan membantu bangsa berkembang di masa depan. Oleh karena itu, pendapatan negara merupakan suatu hal yang krusial untuk dilakukan kalkulasi. Anggaran harus dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menunjukkan pencapaian anggaran yang diharapkan selama periode waktu tertentu. Jika pekerjaan telah dilaksanakan dan diimplementasikan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun, maka anggaran dapat terserap dengan sebaik-baiknya (Rahim & Saputra, 2018). Evaluasi publik terhadap pemerintah akan berdampak buruk pada kinerja jika penyerapan anggaran di bawah standar. Beberapa variabel dapat berkontribusi terhadap penyerapan anggaran yang kurang optimal. Menurut sejumlah faktor, antara lain terkait proses lelang dan pengadaan,

## Sumber Pendapatan Negara

Tiga jenis pendapatan utama yang diterima Indonesia adalah uang dari pajak, pendapatan dari sumber selain pajak, dan pendapatan dari hibah. Berikut adalah rincian dan penjelasan untuk ketiga sumber pendanaan negara di atas, yang masih dipisahkan menjadi beberapa macam:

### 1. Pendapatan Negara bersumber dari Pajak.

Lebih dari 80% dari seluruh penerimaan negara berasal dari pajak yang merupakan penyumbang utama selama ini (Putri & Najicha, 2021). Jenis pajak yang berbeda membentuk pajak itu sendiri.

a. Penerimaan pajak penghasilan, untuk memulai. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 memproyeksikan penerimaan pajak penghasilan (PPh) sebesar Rp 894,4 triliun. Nilai tersebut sebagian besar terdiri dari PPh non-migas badan, yang totalnya mencapai Rp 440,6 triliun, serta PPh non-migas pihak pribadi, yang totalnya mencapai Rp 387,6 triliun. Estimasi APBN 2019 belum sepenuhnya terwujud seperti yang diperkirakan. Meski sebatas prakiraan, data ini relatif dapat dipercaya karena memperhitungkan APBN dari tahun lalu.

b. Pendapatan PPN, PPN merupakan sumber pemasukan pemerintah nomor 2 terbesar. Besarnya PPN yang diantisipasi adalah Rp. 655,4 triliun rupiah. Nilai tersebut tersusun atas PPN lainnya, PPN impor, serta PPN dalam negeri masing-masing senilai Rp 410,7 triliun serta Rp 223,3 triliun. PPN tersebut lebih tinggi dari prognosis APBN 2018 dimana senilai Rp 564,7 triliun serta implementasi APBN 2017 senilai Rp 480,7 triliun.

c. Pajak Cukai. Pemerintah memungut cukai atas produk tertentu dimana peredarannya harus dilacak dan dikelola. Satu-satunya perbedaan antara cukai dan pajak adalah, bahwa barang apa pun yang dikenakan cukai hampir pasti dikenakan pajak. Namun, barang-barang yang dikenakan pajak mungkin juga tidak dikenakan cukai. Cukai di Indonesia diantisipasi akan menghasilkan pendapatan sebesar Rp165,5 triliun untuk APBN 2019. Pajak atas produk tembakau adalah sumber utama pendapatan cukai (cerutu, rokok, dan lainnya.). Setelah itu, cukai atas minuman didalamnya terkandung etil alkohol (MMEA) serta konsentrat akan diterapkan (KMEA).

d. Pendapatan bea dari impor dan ekspor. Bea masuk adalah salah satu aliran pendapatan negara yang secara signifikan berkontribusi pada anggaran negara, seperti halnya pajak dan cukai. Untuk impor dan ekspor, pemerintah mengenakan bea masuk. Pemerintah berniat untuk menghabiskan Rp 38,9 triliun untuk biaya impor dan Rp 4,4 triliun untuk bea ekspor dalam anggaran 2019. Karena upaya pemerintah untuk membatasi impor barang asing dan untuk mempromosikan industri dalam negeri, tarif impor cukup tinggi. Meskipun demikian, pajak ekspor jauh lebih rendah karena sering kali hanya dikenakan pada produk mentah serta setengah jadi misalnya rotan, pasir besi, serta minyak sawit. Guna memaksimalkan potensi ekonomi lokal, pemerintah

sering membebaskan barang-barang yang dibuat oleh UMKM dan bisnis inovatif dari persyaratan ekspor.

e. Pendapatan PBB. Dalam APBN 2019, Pajak Bumi dan Bangunan, sumber pendanaan negara, sanggup menyediakan Rp19,1 triliun. Hampir semua tanah dan bangunan, baik yang dimiliki atau digunakan oleh perusahaan atau perorangan, dikenakan pajak. Tanah yang kena pajak antara lain mencakup tambang, kebun, dan pekarangan. bangunan besar, seperti gedung bertingkat, tempat usaha, pusat perbelanjaan, dan jalan tol. Namun, beberapa tempat beribadah, pemakaman, taman nasional, hutan lindung, properti serta bangunan yang dimiliki oleh wakil diplomatik (dalam kondisi tertentu), serta kelompok asing dikecualikan dari PBB (ketentuan berlaku).

f. Pendapatan Pajak Lainnya. Pajak berikut ialah cara bagi negara untuk mengumpulkan uang atas pajak yang tidak tercakup dalam pajak-pajak yang disebutkan di atas. Pemerintah mengantisipasi penerimaan Rp8,6 triliun dari berbagai pajak dalam APBN 2019.

## 2. Sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Meskipun uang pajak adalah sumber utama pendapatan negara, PNBP masih memberikan kontribusi yang signifikan terhadap anggaran negara. Pemerintah telah menetapkan target untuk anggaran 2019 senilai Rp 378,3 Triliun, naik dari perkiraan untuk tahun 2018 dan 2017 masing-masing senilai Rp 349,2 Triliun serta Rp 311,2 Triliun. Penerimaan PNBP bersumber atas berbagai fungsi serta penggunaan pemerintah lewat saluran-saluran diantaranya:

a. PNBP sumber daya alam migas, Pendayagunaan sumber daya alam migas ataupun penggunaan sumber daya alam migas masih terus digalakkan oleh pemerintah. Perkiraan jumlah penerimaan negara dari SDA migas pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 159,8 triliun, naik dari perkiraan Rp. 144,3 triliun untuk tahun 2018 dan perkiraan Rp. 81,8 triliun untuk tahun 2017. Sumber daya gas alam dan minyak bumi harus digunakan secara maksimal karena merupakan sumber pendapatan utama PNBP.

b. Pendapatan dari Kekayaan yang Dipisah. Sumber pendapatan pemerintah yang dihasilkan atas komponen profit BUMN dikenal sebagai pendapatan kekayaan yang dipisahkan. Terdapat berbagai BUMN di Indonesia, beberapa di antaranya ialah PT Bank Mandiri, PT Jasa Raharja, PT Wijaya Karya, PT Pegadaian, PT Garuda Indonesia, Perum Bulog, serta masih banyak yang lainnya. Secara keseluruhan, BUMN sanggup menghasilkan penerimaan senilai Rp. 43,9 triliun pada tahun 2017, Rp. 44,7 triliun adalah apa yang diantisipasi untuk 2018, dan Rp. 45,6 triliun adalah apa yang diinginkan untuk 2019.

c. Pendapatan dari Badan Layanan Umum (BLU). Sebuah organisasi yang disebut Badan Layanan Umum (BLU) ada terutama untuk membantu masyarakat umum. BLU tidak mengutamakan keuntungan meskipun layanannya tidak sepenuhnya gratis. Layanan kesehatan dan pendidikan merupakan mayoritas BLU; perguruan tinggi negeri dan semua rumah sakit milik pemerintah adalah dua contohnya.

d. PNBP untuk sumber daya alam nonmigas. SDA nonmigas hampir sama dengan SDA migas, yaitu mengacu atas pendayagunaan SDA selain migas. Tambang mineral serta batu bara, diikuti oleh kehutanan, perikanan, dan pemanfaatan energi panas bumi, merupakan sumber penerimaan negara SDA nonmigas terpenting di Indonesia.

e. Pendapatan bukan pajak lainnya. PNBP lainnya dikuasai oleh badan, Lembaga, kementerian maupun divisi pemerintahan yang pada dasarnya identik dengan BLU. Polri, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan tiga lembaga/kementerian yang diperkirakan akan menghasilkan penerimaan negara paling besar pada tahun 2019. Selain itu, setiap sumber pendapatan pemerintah prospektif yang belum disebutkan dalam kategori yang disebutkan di atas tercakup dalam "pendapatan bukan pajak lainnya."

### 3. Sumber Hibah

Hibah adalah jenis uang negara yang diterima pemerintah dengan sukarela dan tanpa syarat. Pendapatan ini hanya semacam bantuan; bukan pinjaman atau jenis perjanjian khusus lainnya karena tidak mengakibatkan kewajiban apa pun. Hibah dapat berasal dari sumber domestik atau internasional. Bank Dunia, Bank Pembangunan Asean (ADB), dan Dana Moneter Internasional (IMF) adalah beberapa organisasi yang telah menawarkan bantuan keuangan kepada Indonesia.

### **Pengeluaran Pemerintah**

Pengeluaran pemerintah (Government Expenditures) merupakan salah satu bagian yang berupa aksi pemerintah dalam menerapkan kebijakan fiskal sebagai upaya pengaturan terhadap arus perekonomian. Pengeluaran pemerintah dilakukan dengan penentuan terhadap nilai penerimaan serta pengeluaran pemerintah yang diukur setiap tahun dan tercantum dalam dokumen nasional melalui APBN, maupun dokumen daerah atau regional dalam APBD. Sebagai suatu kebijakan fiskal pengeluaran pemerintah memiliki tujuan untuk dapat memberikan kestabilan terhadap harga, output level, hingga peluang keterbukaan lapangan pekerjaan yang dapat memantik dan menumbuhkan perekonomian bangsa. Terdapat beberapa kategori yang dibagi dalam rangka mengelompokkan pengeluaran pemerintah. Kategori tersebut seperti pembayaran transfer, konsumsi, maupun pembayaran bunga oleh pemerintah. Setelah dimasukkan ke dalam kelompok tersebut dilakukan klasifikasi yang dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu:

1. Pengeluaran saat ini (current expenditure);
2. Pengeluaran modal (capital expenditure);
3. Pembayaran transfer (transfer payments)

Ada banyak kebijakan anggaran yang digunakan dalam kebijakan fiskal, termasuk anggaran berimbang, surplus, serta defisit. Anggaran berimbang, dalam arti luas, ialah anggaran yang pendapatan dan pengeluarannya sama. Ketika pengeluaran lebih rendah dari pendapatan, maka anggaran tersebut mengalami surplus. Sedangkan anggaran yang defisit berarti pengeluaran melebihi pendapatan. Apabila negara bercita-cita dalam pengentasan permasalahan inflasi, perlu adanya penggunaan anggaran surplus. Kebijakan ini dapat membantu pemerintah dalam pengentasan permasalahan sosial seperti

kemiskinan dan masalah ketenagakerjaan. Harusbaliknya terjadi dalam hal melakukan peningkatan terhadap pembangunan perekonomian, negara dapat mengatur adanya peningkatan terhadap pengeluaran dan perbelanjaan. Pengeluaran pemerintah dapat ditingkatkan jika ada inisiatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menurunkan pengangguran. Pengeluaran rutin, aparatur daerah, pembangunan, dan pelayanan publik, semuanya berada di bawah payung pengeluaran pemerintah.

### **Teori Pengeluaran Pemerintah**

Pengeluaran Pemerintah Menurut interpretasi Keynes, satu diantara komponen permintaan agregat adalah pengeluaran pemerintah. Rumus pendekatan pengeluaran untuk memperkirakan penerimaan nasional adalah  $Y = C + I + G + X - M$ . cirikhas pendapatan nasional adalah nama dari rumus ini. Variabel-variabel di sisi kanan dikenal sebagai permintaan agregat, sedangkan variabel Y ialah singkatan atas pendapatan nasional dan mewakili penawaran agregat. Pengeluaran pemerintah diwakili oleh variabel G. Dimungkinkan untuk menentukan tingkat kontribusi pengeluaran pemerintah terhadap penciptaan penerimaan nasional melalui perbandingan nilai G pada Y dan melacak sepanjang waktu. (Dumairy, 1996).

Teori Rostow serta Musgrave tentang pembangunan dan pengeluaran pemerintah membedakan antara tahap awal, menengah, serta tahap lanjutan pembangunan perekonomian dan mengaitkan pengeluaran pemerintah dengan masing-masing tahap. (1) Tahap awal, porsi investasi yang signifikan dilakukan selama tahap awal pertumbuhan ekonomi karena pemerintah diharuskan menyediakan infrastruktur, seperti untuk kesehatan, pendidikan, dan transportasi. (2) Pada titik ini, investasi swasta menjadi lebih penting, namun investasi pemerintah masih diperlukan agar ekonomi berkembang dan lepas landas. (3) Pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih lanjut, pengeluaran pemerintah bergeser dari penyediaan infrastruktur dan menuju inisiatif sosial seperti kesehatan masyarakat dan program kesejahteraan untuk orang tua (Mangkoeseobroto, 2001).

### **Teori Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi, berdasarkan Todaro beserta Smith (2006), ialah serangkaian proses dalam meningkatkan kemampuan produksi dalam perekonomian secara konsisten dan berkelanjutan Pada kurun waktu tertentu yang dilakukan sebagai upaya memberikan hasil terhadap tingkatan pendapatan dan produksi negara yang meningkat seiring dengan perkembangan waktu. Tiga elemen tumbuhnya perekonomian yang sangat krusial untuk tiap rakyat ialah: (1) akumulasi modal, yang mencakup seluruh investasi baru pada real estat, mesin, serta SDM lewat kemajuan dalam kesejahteraan, pendidikan, dan keterampilan yang berhubungan dengan tenaga kerja; (2) pertumbuhan populasi, yang pada akhirnya menghasilkan tenaga kerja yang terus bertambah; dan (3) perkembangan teknologi, yang secara luas didefinisikan sebagai metode baru dalam melaksanakan tugas. Ekonomi dengan pertumbuhan dan prosesnya yang tinggi serta berkelanjutan menjadi kondisi penting dalam proses pembangunan perekonomian nasional (Tambunan, 2001).

Ekonomi yang terus-menerus tumbuh menjadi indikasi bahwa roda aktivitas ekonomi yang dijalankan memberikan hasil berupa penambahan pemasukan masyarakat

yang diukur dalam masa periode tertentu. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi baru terjadi apabila terdapat perubahan berupa kenaikan terhadap pendapatan riil di tengah masyarakat yang diukur dalam periode tertentu. Robert Solow (Massachusetts Institute of Technology) beserta Trevor Swan menciptakan hipotesis pertumbuhan ini (The Australian National University). Teori ini menyatakan bahwa penawaran variabel produksi (pertumbuhan penduduk, akumulasi tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknis keduanya meningkat. Berdasarkan teori tersebut, yang didasarkan pada analisis klasik, perekonomian akan terus memiliki lapangan kerja penuh serta kapabilitas peralatan modal akan terus digunakan secara penuh setiap saat.

Teori ini juga berbicara mengenai rasio modal-output atau capital-output ratio = (COR) yang memiliki sifat dinamis sehingga memungkinkan adanya perubahan. Output output lainnya diciptakan dalam rangka agar dapat dipergunakan sebagai jumlah modal yang mempunyai perbedaan antara satu sama lain dengan hibah berupa tenaga kerja yang dipakai seimbang dengan jumlah tenaga kerja yang diperlukan. Apabila didapati bahwasannya modal yang telah tergunakan memiliki jumlah yang lebih sedikit maka dapat dikatakan bahwasanya tenaga kerja yang digunakan akan lebih banyak. Oleh karenanya dengan adanya fleksibilitas sedemikian rupa menjadikan perekonomian pada suatu wilayah dapat memiliki hak prerogatif yang tidak memiliki batas untuk melakukan penentuan terhadap beragam kolaborasi dari tenaga kerja dan capital yang dibutuhkan dan akan dipergunakan untuk memberikan hasil pada tingkat output tertentu. Para ahli ekonomi seperti Smith, Ricardo, Malthus, Mill, Solow, hingga Swan yang berasal dari aliran klasik hingga neoklasik memiliki pendapat yang didasari terhadap empat elemen utama dengan pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu: jumlah penduduk, besaran stok kapital, perkembangan teknologi, dan ketersediaan sumber daya alam dan lahan.

## 2. Metode

Artikel ini menggunakan kajian literatur dengan pendekatan *systematic literature review*. Studi literatur adalah teknik guna mengumpulkan banyak referensi yang berhubungan dan berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti (Xiao & Watson, 2019). Kajian analitis yang diperoleh artikel ini berasal dari berbagai dokumen akademis dan non akademis seperti artikel jurnal, policy brief, dokumen perencanaan pembangunan nasional, *working paper* Kementerian terkait, dan media massa online *mainstream* tentang kondisi perekonomian nasional. Pendekatan ini juga digunakan untuk memperkuat isu-isu yang sedang diteliti dan berfungsi sebagai landasan untuk memahami bagaimana perpajakan dan pengeluaran pemerintah berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Peran pendapatan nasional dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa adalah untuk mengukur kemakmuran dan menilai keadaan ekonomi pada skala tertentu. Standar hidup untuk berbagai kategori orang yang berbeda di negara tersebut juga ditunjukkan oleh pendapatan nasional. Keuntungan lain dari pendapatan nasional termasuk penggunaannya sebagai alat untuk menilai kinerja industri dan pengukur perubahan ekonomi secara teratur. Pendapatan nasional adalah faktor lain yang mempengaruhi indeks inflasi suatu

negara. Pemerintah menggunakan pendapatan nasional sebagai tolok ukur untuk memantau perubahan dari waktu ke waktu. Dampaknya pada keadaan politik, sosial, dan budaya yang tidak terbatas pada sektor ekonomi. Suatu negara akan menganggap pendapatan nasionalnya penting dikarenakan melalui pendapatan nasional tersebutlah kesejahteraan rakyat dapat dicapai oleh pemerintah dan dapat pula digunakan dalam perbaikan terhadap kondisi ekonomi negara tersebut (Adji et al., 2020).

Selain itu, manfaat dari pendapatan nasional adalah agar suatu negara dapat unggul dan maju berdasarkan pertumbuhan apabila dilakukan perbandingan dengan negara lain. Oleh karena itu, pendapatan negara menjadi salah satu sumber refleksi dalam tolok ukur kemajuan suatu negara. Perlu dipahami bahwasanya pendapatan nasional suatu negara merupakan kalkulasi dari keseluruhan pendapatan yang diperoleh oleh seluruh pelaku ekonomi di suatu negara dalam kurun waktu tertentu yang umumnya berupa satu tahun. Negara sendiri memperoleh pendapatan yang berasal dari hibah, pajak, pendapatan non pajak, dan pendapatan-pendapatan lainnya. Pemerintah melakukan pengeluaran yang kemudian berpengaruh terhadap beragam sektor pada ekosistem ekonomi. Secara langsung maupun tidak langsung, pengeluaran pemerintah memberikan pengaruh terhadap sektor produksi baik berupa produksi barang maupun produksi jasa. Produksi barang dan jasa yang diperlukan pemerintah akan terpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa tersebut. Sedangkan secara tidak langsung misalnya dalam sektor pendidikan yang dapat mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas sebagai peningkatan produksi memberikan pengaruh terhadap perekonomian yang dikelola oleh pemerintah. Sektor konsumsi masyarakat juga tidak terlepas dari pengaruh terhadap pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa (Ramadhani et al., 2022).

Hal ini dikarenakan, pengeluaran pemerintah mencakup adanya subsidi yang memberikan kesempatan bagi masyarakat dengan perekonomian menengah ke bawah agar dapat mendapatkan bantuan dan kemudahan khusus baik berupa barang maupun jasa. Subsidi yang disediakan pemerintah misalnya BBM, gas LPG, maupun listrik. Apabila pemerintah melakukan perubahan kebijakan terhadap subsidi BBM maka sektor konsumsi masyarakat juga akan berpengaruh secara signifikan. Umumnya kenaikan harga BBM atau pengurangan subsidi BBM akan membuat sektor konsumsi masyarakat menjadi lesu. Pemerintah memiliki kewenangan dalam pengaturan alokasi dan tingkat pengeluaran negara untuk dapat mencapai tujuan peningkatan PDB. Pemerintah dapat melakukan pengaturan mengenai tingkat pengeluaran negara dengan level yang tinggi pada sektor tertentu dan dapat pula menetapkan regulasi terhadap tingkat angkatan kerja di tengah masyarakat menuju full employment. Apabila pembiayaan pengeluaran tersebut tidak dapat dilakukan melalui target penerimaan, pemerintah tetap dapat melakukan pembiayaan melalui pola-pola defisit anggaran.

Menurut teori Keynesian, variabel seperti pengeluaran konsumsi, investasi, ekspor, maupun pengeluaran pemerintah memberikan pengaruh terhadap pendapatan nasional. Teori ini juga berargumen bahwa dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan bersandar pada peningkatan pendapatan nasional, menjadi suatu hal yang penting untuk dilakukan juga peningkatan terhadap barang-barang konsumsi, pengeluaran pemerintah, permintaan impor, maupun ekspor.  $Y = C + I + G + X - M$  adalah rumus untuk menentukan pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pengeluaran. Persamaan identitas

pendapatan nasional adalah rumus ini, di mana Y adalah singkatan dari pendapatan nasional serta penawaran agregat, G untuk pengeluaran pemerintah, I untuk investasi, dan X-M untuk ekspor neto. Adalah mungkin untuk menentukan seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah terhadap penciptaan pendapatan nasional dengan membandingkan nilai G dengan Yan dan melacaknya sepanjang waktu.

Wagner dalam kajian (Ferdiansah, 2022) menunjukkan hasil bahwa terdapat adanya kecenderungan dalam peningkatan aktivitas pemerintah yang berimbas pada peningkatan pengeluaran pemerintah. Wagner menyebut bahwasanya kecenderungan ini sebagai suatu hukum dengan meningkatnya peran pemerintah (*law of ever increasing state activity*). Namun Sebagai faktor krusial dalam pembangunan, pertumbuhan ekonomi secara terus-menerus menjadi perhatian dari pemerintah maupun ahli. Suatu negara atau wilayah dapat dikatakan mengalami keberhasilan dalam pembangunan apabila berkaca dari pertumbuhan ekonomi yang telah tercapai. Penghitungan secara konvensional terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dengan melakukan kalkulasi terhadap kenaikan persentase pada tingkat nasional melalui PDB atau tingkat daerah provinsi, kabupaten, ataupun kota melalui Produk Domestik Regional Bruto. PDRB sendiri dapat dipahami sebagai suatu jumlah yang menjadi nilai pertambahan yang didapat dari keseluruhan unit usaha yang berada pada suatu region tertentu. Selain itu dapat pula dipahami sebagai kalkulasi akhir nilai jasa maupun barang yang diproduksi oleh keseluruhan unit ekonomi yang ada di wilayah dalam waktu tertentu. Dengan demikian, dapat dipahami bahwasanya suatu wilayah dapat melakukan pengukuran terhadap pertumbuhan ekonomi apabila direfleksikan dari tingkatan pertumbuhan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

## Kesimpulan

Pendapatan nasional (GNP) dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, secara khusus pendapatan nasional menunjukkan tingkat output yang dapat dihasilkan masyarakat; jika pendapatan nasional meningkat, pertumbuhan ekonomi juga meningkat; jika pertumbuhan ekonomi terus meningkat, kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat; akibatnya, pembangunan ekonomi juga akan meningkat. Peranan pengeluaran pemerintah dalam membentuk perekonomian sangat penting. Bersama dengan pengeluaran pribadi, investasi perusahaan, dan ekspor neto, hal ini berkontribusi terhadap permintaan agregat. Dengan demikian, perekonomian akan terpengaruh oleh perubahannya. Ketika permintaan agregat naik, permintaan agregat naik, dan kita mengantisipasi laju ekspansi ekonomi yang lebih cepat. Di sisi lain, ketika pemerintah mengurangi pengeluaran, perekonomian dan permintaan agregat akan menderita. Kebijakan pengeluaran atau belanja pemerintah telah terbukti secara eksperimental mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada tingkat nasional dan regional dalam sejumlah penelitian sebelumnya. Serupa dengan pengaruhnya terhadap pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi.

## Referensi

- Adji, A., Hidayat, T., Tuhiman, H., Kurniawati, S., & Maulana, A. (2020). Pengukuran Garis Kemiskinan di Indonesia: Tinjauan Teoretis dan Usulan Perbaikan. *Tnp2K*, 1–36.
- Andre yonansa Ramadhani, D. S. (2022). *ANALISIS PENGARUH INVESTASI, INFLASI, CADANGAN DEvisa, DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PRODUK DOMESTIK BRUTO*. 11, 1654–1661.

- Arifah, L. F., Basorudin, M., Majid, M. A., Choirunnisa, M., & Eltheofany S, P. L. (2020). Studi Empiris Pengaruh Harga Minyak Mentah Dunia dan Variabel Moneter Terhadap Perekonomian Indonesia Periode 1996-2018. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 10(1), 23. <https://doi.org/10.35448/jequ.v10i1.8577>
- Dedy C, W. (2015). Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara. *Lex Et Societatis*, 3(7), 110–120.
- Eichenbaum, M. S., Rebelo, S., & Trabandt, M. (2020). The Macroeconomics of Epidemics. *NBER Working Paper Series*.
- Fitri Amalia, Ria Kusumaningrum, Nur Fitriyani Sahamony, E. L. (2022). *Ekonomi Pembangunan* (R. Kusumaningrum (ed.); Februari.). Widina Bhakti Persada Bandung.
- Putri, D. A., & Najicha, F. U. (2021). Reformasi Perpajakan di Indonesia. *Jurnak Hukum POSITUM*, 6(2), 168–178.
- Rabbani, D. R. S. (2020). Public Trust Building Strategy Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah: Telaah Proses Refocusing Dan Realokasi Apbd (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Dalam Upaya Penanganan Pandemi Covid-19. *Legislatif*, 4(1), 59–78. <https://www.hhrjournal.org/2020/04/covid-19->
- Rahim, A., & Saputra, H. (2018). Exploratory Factor Analysis (EFA) Pada Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2017 di Provinsi Sumatera Barat. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 3(3), 236–254. <https://doi.org/10.33105/itrev.v3i3.72>
- Rudi Ferdiansah, R. H. (2022). *DAMPAK KONSUMSI PENGELUARAN PEMERINTAH, RUMAH TANGGA DAN INVESTASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI*. 11(1), 707–714.
- Sari, N., Rizki, M., Dinya Solihati, K., & STIA LAN Jakarta, P. (2021). Dampak Stimulus Pemerintah Untuk Umkm Pada Era Pandemi Covid-19. *Journal of Business Administration Economic & Entrepreneurship*, 3(1), 1–8.
- Xiao, Y., & Watson, M. (2019). Guidance on Conducting a Systematic Literature Review. *Journal of Planning Education and Research*, 39(1), 93–112. <https://doi.org/10.1177/0739456X17723971>
- Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Jakarta.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)